

DESAIN KOMUNIKASI DALAM UPAYA MENYELESAIKAN KONFLIK ANTAR AKTOR PADA KASUS PULAU REMPANG

Ni'matus Gesa Octavyanida^{1*}, Tiara Cahaya Putri², Reza Fathurrahman³

^{1,2,3}Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Indonesia, Kota Depok, Indonesia
nimatusgesa@gmail.com^{1*}, cahayatiara99@gmail.com², rezafathurrahman@ui.ac.id³

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang peran pemerintah dalam memberikan pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan produktivitas masyarakat. Studi kasus berfokus pada pengembangan Rempang Eco City di Indonesia yang menghadapi tantangan karena kurangnya keterlibatan masyarakat lokal dan hanya mengandalkan aspek teknis saja. Upaya relokasi yang tidak mempertimbangkan aspek sosial dan emosional masyarakat sehingga menimbulkan konflik dan pelanggaran HAM. Hal ini menyoroti perlunya strategi komunikasi efektif yang melibatkan multi aktor untuk memastikan bahwa proyek pembangunan berkelanjutan dan tidak mendiskriminasi penduduk asli setempat. Pemerintah, masyarakat adat, dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam perlu memahami kepentingan dan keprihatinan masing-masing untuk meminimalisir munculnya ego sektoral, dominasi, dan informasi asimetris. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk mengeksplorasi konflik antar sektor di Pulau Rempang. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen, pengumpulan informasi dari berbagai sumber sekunder yang kredibel. Analisis data yang digunakan bersifat deskriptif, bertujuan untuk memberikan interpretasi terhadap konflik dan implikasinya. Landasan teori dari penelitian ini adalah pentingnya komunikasi yang efektif dalam perumusan dan implementasi kebijakan, yang sangat penting bagi berfungsinya demokrasi di negara berkembang seperti Indonesia.

Kata kunci : komunikasi efektif; konflik; Rempang; relokasi; transaksional

ABSTRACT

This study discusses the role of the government in providing public services and infrastructure development to increase economic growth and community productivity. The case study focuses on the development of Rempang Eco City in Indonesia, which faced challenges due to the lack of involvement of the local community and the reliance on technical aspects only. The relocation efforts did not consider the social and emotional aspects of the community, leading to conflicts and human rights violations. It highlights the need for an effective communication strategy involving multi-actors to ensure that development projects are sustainable and do not discriminate against local indigenous populations. The government, indigenous communities, and BP Batam need to understand each other's interests and concerns to minimize the emergence of sectoral egos, dominance, and asymmetric information. The research study used a qualitative approach with descriptive methods to explore the conflict between sectors on Rempang Island. Data collection was conducted through document study, gathering information from various credible secondary sources. The data analysis was descriptive, aiming to provide an interpretation of the conflicts and their implications. The theoretical basis of the text is the importance of effective communication in policy formulation and implementation, which is crucial for the proper functioning of democracy in a developing country like Indonesia.

Keywords : conflict; effective communication; relocation; Rempang; transactional

PENDAHULUAN

Pemerintah merupakan aktor yang berperan dalam segala aktivitas yang menyangkut hajat hidup masyarakat. Pemerintah pusat memiliki peran sebagai aktor sentral yang berkewajiban dan bertanggung jawab untuk selalu memberikan pelayanan publik yang prima, salah satunya melalui pembangunan infrastruktur. Aktivitas tersebut bertujuan untuk meningkatkan produktivitas masyarakat yang secara selaras akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan diharapkan mampu berimplikasi pada kesejahteraan masyarakat secara merata. Pembangunan infrastruktur kerap kali menjadi salah satu instrumen yang dilakukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Chaerudin, M. A. Y. C., 2023). Indonesia memiliki pembangunan strategis nasional untuk mempercepat realisasi dalam menciptakannya.

Kepala Badan Pembinaan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum, Bambang Guritno dalam membuka Seminar dan Rapat Anggota Asosiasi Kontraktor Indonesia (2011) menyatakan bahwa pembangunan nasional terus digencarkan dengan orientasi terhadap stabilitas dan pertumbuhan ekonomi berdampak meluas (*multiplier effect*) yang kerap kaitannya dengan terbukanya lapangan kerja baru dan penyediaan fasilitas layanan sarana prasarana untuk ekonomi kerakyatan. Alih fungsi lahan dilakukan untuk mendukung realisasi terciptanya Rempang Eco City. Dalam mewujudkan hal tersebut, pemerintah tidak dapat secara independen untuk melaksanakannya terlebih karena terdapat keterbatasan dalam kapabilitas baik dari segi anggaran, sumber daya, maupun kapasitas wewenang pemerintah. Dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian, pembangunan infrastruktur mengundang adanya interaksi dengan pihak swasta untuk melakukan investasi. Chaerudin (2023) menyayangkan upaya relokasi tidak dengan menggunakan tindakan persuasif dan tidak dijelaskan lebih lanjut terkait prosedur dan kepastian hukum. Pembangunan Rempang Eco City dinilai hanya mengandalkan aspek teknis saja dimana para *stakeholders* hanya berfokus kepada penempatan lokasi strategis nasional untuk perekonomian, tetapi tidak memperhatikan bahwasannya Pulau Rempang dengan penduduk yang padat kesehariannya bertumpu pada kearifan lokal (Assyifarizi, A., & Purwanto, I., 2023). Masyarakat merasa dijadikan sebagai objek kebijakan karena minim keterlibatannya pada proyek strategis nasional tersebut. Tindakan relokasi yang dilakukan juga hanya memperhatikan aspek teknis. Padahal untuk melakukan relokasi bukanlah perihal sederhana yang terbatas pada pemindahan masyarakat menuju ke lokasi lain. Perlu dilakukan adanya identifikasi terhadap aspek-aspek sosial dan perlu dilakukan adanya pendekatan secara emosional antara pemerintah dengan masyarakat.

Konflik masyarakat Pulau Rempang bagai tiada ujungnya. Bermula sejak tahun 1971 dan kembali memuncak pada 7 September tahun 2023 (Walangare, S., dan Bachri, S., 2023). Terdapat beberapa hal yang menjadi aspek penting untuk ditinjau lebih lanjut yakni aspek ekonomi, lingkungan, sosial, dan masyarakat. Jika meninjau melalui perspektif Hak Asasi Manusia (HAM), kasus ini dapat dianggap sebagai pelanggaran HAM. Dasar hukum hal tersebut dapat merujuk Basic Principles and Guidelines on Development-Based Eviction and Displacement A/HRC/18 (2009) dimana menurut Dewan HAM PBB, penggusuran paksa merupakan pelanggaran HAM berat karena melanggar sejumlah hak asasi manusia yang diakui secara internasional, termasuk hak atas perumahan yang layak, makanan, air, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, keamanan pribadi, keamanan rumah, kebebasan dari perlakuan kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat, serta kebebasan bergerak. Kemudian berdasarkan Fact Sheet No. 25/Rev.1 PBB (2014) tentang Penggusuran Paksa. Pernyataan PBB ini menegaskan bahwa penggusuran paksa melanggar secara langsung dan tidak langsung seluruh spektrum hak sipil, budaya, ekonomi, politik, dan sosial yang dilindungi oleh instrumen internasional HAM serta berdasarkan Undang-undang No. 26/2000 tentang Pengadilan HAM mencatat bahwa penggusuran paksa, seperti yang terjadi di Pulau Rempang, dapat dianggap sebagai kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Pemindahan penduduk secara paksa dapat diidentifikasi sebagai pemaksaan eksodus massal yang mencabut warga dari akar kehidupan sosial, budaya, dan komunitasnya.

Konflik antar aktor tersebut akan memunculkan sentimen negatif terhadap pemerintah terlebih lagi masyarakat setempat merasa diasingkan dalam perumusan kebijakan bahkan saat proyek sudah berlangsung. Dengan adanya berbagai konflik yang terjadi, diperlukan adanya strategi komunikasi yang dilakukan melalui pemerintah dengan melibatkan multisektor agar proyek pembangunan ini tetap berjalan secara berkelanjutan tanpa mendiskriminasi dan merugikan penduduk asli setempat.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian yang digunakan dalam studi literatur, yang melibatkan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Melalui pendekatan kualitatif ini, untuk dapat memahami, mengamati, dan mengeksplorasi secara lebih mendalam, serta pengungkapan secara detail permasalahan terkait konflik antar aktor pada kasus Pulau Rempang. Pengumpulan data penelitian menggunakan studi dokumen, dengan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber sekunder yang valid dan kredibel yang diperoleh dari buku, hasil penelitian di jurnal nasional, internasional, internet, berita baik di media cetak maupun media *online*, dan sumber kredibel lainnya. Pada metode penelusuran dokumen yang dilakukan dengan memfilter sumber referensi menggunakan kata kunci *theories of communication* dengan periode tahun publikasi 10 tahun terakhir. Analisis data dilakukan secara deskriptif yang bertujuan untuk memberikan interpretasi mengenai fenomena dan situasi yang terjadi, yaitu konflik antar sektor pada kasus Pulau Rempang yang berimplikasi terhadap bentrokan, disini pemerintah perlu melakukan advokasi kepada berbagai pihak yang terlibat dalam upaya penyelesaian masalah. Penelitian ini diharapkan dapat mendapatkan hasil penelitian yang dapat digunakan sebagai solusi sebuah permasalahan terkait.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kronologi Kasus Konflik Lahan Pulau Rempang

Belum lama ini, pada tanggal 7 September 2023 telah terjadi konflik agraria di Indonesia, tepatnya konflik agraria yang terjadi di Pulau Rempang. Berbagai media memberitakan telah terjadi bentrokan antara warga Rempang dengan aparat gabungan dari Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), dan Direktorat Pengamanan Badan Pengusahaan (Ditpam BP). Bentrokan ini terjadi, akibat dari konflik lahan yang muncul, warga Pulau Rempang enggan untuk direlokasi karena lahan yang ditempatinya tersebut akan dilakukan pembangunan kawasan ekonomi baru Rempang Eco City (CNN Indonesia, 2023).

Perlu diketahui bahwa pembangunan Rempang Eco City ini telah masuk ke dalam Program Strategis Nasional (PSN) berdasarkan pada Peraturan Menteri Koordinator (Permenko) Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023. Proyek tersebut memiliki target yang dapat menarik investasi sampai Rp 381 triliun pada tahun 2080. Kemudian, Pulau Rempang akan menjadi lokasi kedua terbesar di dunia untuk pabrik kaca yang dimiliki oleh perusahaan China Xinyi Group, investasi proyek ini diperkirakan akan mencapai US\$11,6 miliar atau sekitar Rp 174 triliun.

Konflik agraria ini, berawal dari sejak tahun 2001- 2002, telah dilakukan pemisahan tangan yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan Badan Pengusahaan (BP Batam dengan memberikan Hak Guna Usaha (HGU) Pulau Rempang kepada suatu entitas perusahaan swasta yaitu PT Makmur Elok Graha (CNN Indonesia, 2023). Namun, sampai dengan tahun 2004, lahan atau tanah Pulau Rempang tersebut tak kunjung digarap dan dikunjungi oleh investor. Hal ini yang kemudian lahan tersebut ditempati oleh warga Rempang.

Dengan direncanakannya pembangunan Rempang Eco City tersebut, sehingga perlu dilakukan pengosongan tanah yang telah ditempati oleh warga Pulau Rempang. Konflik mulai pecah saat pemerintah pusat, BP Batam, PT Makmur Elok Graha mulai menggarap pembangunan Rempang Eco City. Terjadi penolakan dari warga saat ingin melakukan proses pengosongan, hal ini dikarenakan warga merasa telah menempatinya lama sejak tahun 1834 (CNN Indonesia, 2023).

Hal ini yang kemudian terjadi bentrokan pada tanggal 7 September 2023 antara warga Rempang dengan aparat gabungan Polri, TNI, dan Ditpam BP Batam di saat BP Batam hendak melakukan pengukuran lahan. Kemudian, kembali terjadi bentrokan antara warga yang dengan tetap menolak proyek ini, tepatnya pada tanggal 11 September 2023 dengan menggelar demonstrasi di depan kantor BP Batam. Kedua bentrokan yang terjadi ini mengakibatkan beberapa orang ditahan oleh pihak kepolisian, dan sejumlah warga maupun aparat yang mengalami luka baik luka ringan maupun berat.

Menurut Mahfud MD sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolkum), kasus Pulau Rempang adalah hasil dari kekeliruan yang terjadi antara pemerintah setempat dan pemerintah pusat yakni Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (CNN Indonesia, 2023). Sebagaimana yang disampaikan oleh Presiden Jokowi Widodo, menyatakan bahwa kericuhan warga yang melakukan aksi protes terhadap kasus ini karena komunikasi yang terjalin kurang baik dan seharusnya tidak terjadi jika warga diajak untuk berdiskusi dan diberikan solusi yang tepat (Kompas.id, 2023).

Solusi yang diberikan pemerintah adalah dengan memberikan kompensasi kepada masyarakat terdampak dengan beberapa tawaran yang diajukan, meliputi pemberian Sertifikat Hak Milik (SHM) atas lahan kepada warga, memberikan rumah tipe 45 yang senilai Rp 120 juta seluas 500 m², memberikan biaya hidup sebesar Rp 1.034.636 per individu tiap bulan, serta memberi biaya sewa sebesar Rp 1 juta per bulan untuk warga yang tinggal di luar hunian sementara (Kompas, 2023). Namun, solusi ini belum optimal disampaikan kepada warga. Hal ini menunjukkan bahwa betapa krusialnya peran pemerintah dalam mengadvokasikan sebuah kebijakan atau program kepada berbagai stakeholders, tak terkecuali kepada masyarakat sekitar guna memastikan pelaksanaan atas kebijakan atau program tersebut dapat berjalan dengan efektif dan mencakup seluruh kepentingan para pihak.

Analisis Model Komunikasi Transaksional untuk Menyelesaikan Permasalahan Konflik Pulau Rempang

Dalam menyelesaikan konflik antar aktor di Pulau Rempang, teori komunikasi transaksional dapat diterapkan. Konsep ini menekankan pentingnya saling pengertian dan interaksi antara pihak-pihak yang terlibat dalam konflik (Watzlawick et al., 2011). Pertama diperlukan identifikasi pihak-pihak yang terlibat dalam konflik di Pulau Rempang. Pemerintah sebagai regulator, masyarakat adat tergabung dalam KERAMAT, dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) sebagai pelaksana proyek Eco-City. Ketiga pihak dapat berperan sebagai pengirim (*encoder*) maupun sebagai penerima pesan (*decoder*). Hal ini menekankan bahwa partisipasi setiap pihak perlu menjadi orientasi dalam menyelesaikan permasalahan sehingga antara pemerintah, masyarakat, dan BP Batam untuk mengetahui kepentingan dan kekhawatiran masing-masing yang akan meminimalisir munculnya ego sektoral, dominasi sektor tertentu, dan asimetris informasi. Pertama yang harus dilakukan adalah dengan mengidentifikasi komponen *filter* untuk menentukan pihak mana saja yang terlibat dalam proses penyelesaian permasalahan konflik yang menjadi target dalam komunikasi transaksional sebagai berikut:

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Sebagai Wakil Pemerintah

Kepentingan: BKPM memiliki tujuan utama untuk mengembangkan proyek Eco-City sebagai langkah untuk meningkatkan potensi ekonomi dan pengembangan wilayah. Proyek ini diharapkan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan infrastruktur.

Kekhawatiran: Pemerintah memiliki kekhawatiran terkait dengan resistensi yang mungkin muncul dari masyarakat adat. Resistensi ini dapat menimbulkan konsekuensi serius, termasuk

kemungkinan penundaan proyek dan dampak negatif pada citra pemerintah. Oleh karena itu, mendapatkan dukungan dan kolaborasi dari masyarakat menjadi krusial.

Masyarakat Adat Melalui KERAMAT

Keuntungan: Masyarakat adat yang tergabung dalam KERAMAT memiliki kepentingan yang kuat dalam menjaga hak kepemilikan tanah Ulayat dan mewariskan budaya turun temurun. Mereka melihat tanah sebagai bagian integral dari identitas mereka dan menolak relokasi yang dapat mengancam keberlanjutan budaya mereka.

Kekhawatiran: Masyarakat adat khawatir akan kehilangan tempat tinggal mereka akibat relokasi. Selain itu, mereka mengkhawatirkan potensi kerusakan lingkungan yang dapat terjadi akibat proyek Eco-City. Kehilangan identitas budaya juga menjadi perhatian utama, karena relokasi dapat memutuskan akar kehidupan sosial dan budaya mereka.

Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam)

Keuntungan: BP Batam bertanggung jawab untuk menyelesaikan proyek Eco-City sesuai rencana. Keberhasilan proyek ini akan meningkatkan reputasi dan memberikan kontribusi signifikan pada pencapaian target pembangunan. Selain itu, proyek ini dapat membuka peluang investasi dan pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.

Kekhawatiran: BP Batam khawatir tentang kemungkinan penundaan proyek yang dapat timbul akibat konflik dengan masyarakat setempat. Konflik ini dapat berdampak negatif pada jalannya proyek, menciptakan ketidakpastian dan menurunkan tingkat kepercayaan investor. Dampak negatif pada proyek juga dapat menciptakan tekanan tambahan pada BP Batam.

PT Makmur Elok Graha

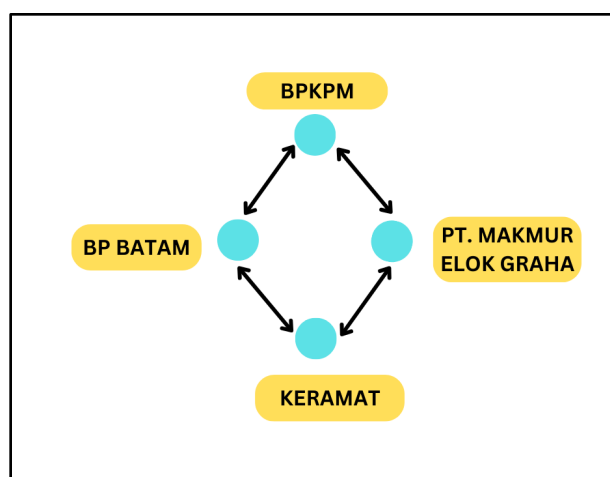
Keuntungan: Melakukan investasi pembangunan proyek Rempang Eco City dengan mengolah bahan baku mentah menjadi bahan jadi dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas dan pendapatan melalui keterlibatan masyarakat sebagai pekerja.

Kekhawatiran: Ketidakhahaman masyarakat mengenai konsep proyek yang akan dijalankan menimbulkan sentimen negatif dari masyarakat setempat.

Setelah mengidentifikasi peran aktor terlibat, perlu diidentifikasi pula masalah yang terjadi saat proses komunikasi berlangsung, diantaranya:

1. Ketidakhahaman masyarakat adat yang masih bertumpu pada kearifan lokal cenderung merasa terancam dengan adanya pembangunan infrastruktur.
2. Tenggat waktu yang ditentukan oleh Pemerintah Pusat melalui BKPM untuk relokasi warga lebih mengarah kepada tindakan represif.
3. Komunikasi pemerintah kepada warga yang bersifat politis dan administratif kurang menunjukkan sikap humanis terlebih adanya persepsi masyarakat adat bahwa pihak pemerintah hanya memberikan 'janji manis' terkait penggantian kompensasi.

Kemudian untuk menerapkan model komunikasi transaksional tersebut setelah mengidentifikasi peran aktor-aktor yang akan terlibat penting untuk membuat jaringan antar aktor agar informasi yang disampaikan mampu memperluas informasi dan berupaya untuk memperluas dukungan untuk mencari solusi terbaik dari permasalahan konflik sektoral pada Pulau Rempang. Dengan multi aktor yang terlibat pada kasus ini, tipe jejaring yang memungkinkan untuk digunakan adalah teori jejaring lingkaran. Teori jejaring dipilih karena tidak ada ketimpangan peran masing-masing aktor yang terlibat. Semua anggota memiliki kedudukan yang sama tanpa adanya penentuan aktor tertentu sebagai pemimpin.



Gambar 3. Struktur Jaringan Lingkaran Pada Kasus Pulau Rempang (Sumber: data olahan penulis, 2023)

Pendekatan Dialog dan Mediasi.

Dalam konteks jaringan komunikasi lingkaran, pendekatan ini memerlukan pembentukan lingkaran komunikasi terbuka antara semua pihak terlibat. Sebuah dialog dan mediasi akan dilakukan untuk mencapai pemahaman bersama (DeVito, 2018) .

- 1) Fasilitasi Dialog Terbuka. Pertama-tama, langkah penting adalah memfasilitasi dialog terbuka di mana setiap pihak dapat menyuarakan kepentingan dan kekhawatiran mereka. Pembentukan lingkaran komunikasi menciptakan platform yang setara, memastikan bahwa suara setiap anggota dihargai dan didengar. Dalam pertemuan terbuka ini, perlu ada struktur yang mendukung partisipasi yang merata. Seorang fasilitator dapat memoderasi diskusi, memberikan waktu yang cukup kepada setiap pihak untuk berbicara, dan memastikan agar tidak ada dominasi suara dari pihak tertentu. Transparansi dan terbuka terhadap ide dan pandangan dari semua anggota jaringan lingkaran menjadi kunci untuk mencapai pemahaman bersama.
- 2) Memastikan Kesempatan Berbicara dan Mendengar. Penting untuk memastikan bahwa setiap anggota jaringan lingkaran memiliki kesempatan untuk berbicara dan mendengar. Keterlibatan aktif dari semua pihak dalam dialog meningkatkan kesempatan untuk mencapai pemahaman yang lebih baik. Memberikan waktu yang cukup untuk setiap anggota jaringan lingkaran mengungkapkan perspektif mereka adalah langkah penting untuk memastikan bahwa semua kekhawatiran dan kepentingan dapat diakomodasi. Selain itu, pendekatan ini juga mendorong kerja sama antara pihak. Dalam struktur jaringan lingkaran, setiap anggota memiliki tanggung jawab untuk mendengarkan dan berkomunikasi dengan anggota di sampingnya. Hal ini menciptakan aliran informasi melingkar yang mempromosikan saling pengertian dan kolaborasi di antara semua pihak terlibat.
- 3) Keterlibatan Mediator Independen. Dalam mendukung atmosfer yang netral dan membantu meredakan konflik, libatan mediator independen yang diakui oleh semua pihak menjadi langkah yang strategis. Keberadaan mediator dapat memastikan bahwa proses mediasi berlangsung dengan adil dan tanpa keberpihakan.
- 4) Peran Mediator. Mediator dalam hal ini tentu harus bersikap tetap netral dan tidak memihak kepada salah satu pihak. Hal ini menciptakan kepercayaan dari semua aktor yang terlibat pada jaringan lingkaran. Netralitas tersebut juga harus diwujudkan dengan membantu memfasilitasi diskusi dengan membuka ruang untuk kompromi dan pencarian solusi bersama. membantu pihak-pihak mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh semua. Ini melibatkan memahami kepentingan masing-masing dan mencari titik temu yang memuaskan semua pihak.
- 5) Mencari Solusi Bersama. Pendekatan dialog dan mediasi dalam jaringan lingkaran tidak hanya bertujuan untuk mendengarkan keluhan dan kekhawatiran, tetapi juga untuk menciptakan

solusi bersama. Ini melibatkan kemampuan untuk berkolaborasi, mengakui perbedaan, dan mencapai kesepakatan yang menghormati kepentingan semua pihak.

Komunikasi Efektif

Setiap anggota berkomunikasi dengan dua anggota di sampingnya. Fokus pada komunikasi efektif sangat penting untuk menghindari kesalahpahaman dan meningkatkan saling pengertian (Monge, 2003).

- 1) Bahasa yang Menghormati dan Berempati. Dalam jaringan lingkaran, penggunaan bahasa yang menghormati nilai dan identitas masing-masing pihak adalah esensial. Bahasa harus dipilih dengan hati-hati untuk menghindari penyalahgunaan atau interpretasi yang merugikan. Menunjukkan empati terhadap kekhawatiran dan perasaan setiap anggota menjadi landasan juga menjadi penting. Dibutuhkan kemampuan untuk mendengarkan dengan penuh perhatian, mencoba memahami perspektif orang lain, dan merespons secara empatik. Dalam pertemuan terbuka, fasilitator harus memastikan bahwa setiap anggota memiliki peluang yang setara untuk berbicara. Hal ini mencakup mendorong pertukaran gagasan dengan bahasa yang menghargai perbedaan dan menghormati sudut pandang unik masing-masing pihak.
- 2) Transparansi Informasi. Transparansi informasi adalah elemen kunci dalam mengelola konflik. Pihak-pihak yang terlibat perlu diberikan informasi yang transparan dan akurat tentang proyek Eco-City, dampaknya, dan rencana relokasi. Ini dapat menciptakan dasar yang kuat untuk perundingan yang informatif. Membuka ruang untuk pertanyaan dan klarifikasi sangat penting. Setiap anggota jaringan lingkaran harus merasa bebas untuk mengekspresikan ketidakjelasan atau kebingungan mereka. Fasilitator dapat memoderasi sesi pertanyaan untuk memastikan bahwa semua kekhawatiran atau ketidakpastian terjawab dengan jelas. Penting untuk menekankan bahwa informasi yang diberikan bersifat terbuka dan dapat diakses oleh semua pihak terkait. Keterbukaan ini membangun kepercayaan di antara anggota jaringan lingkaran dan mengurangi potensi untuk munculnya spekulasi atau kesalahpahaman.
- 3) Dalam konteks jaringan lingkaran, setiap anggota memiliki tanggung jawab untuk menjaga kualitas komunikasi. Mereka tidak hanya berbicara kepada dua anggota di samping mereka, tetapi juga mendengarkan dengan teliti. Ini menciptakan aliran informasi yang melingkar di dalam jaringan, memungkinkan setiap anggota untuk terlibat aktif dalam pertukaran ide (Cross, 2002). Pemahaman perbedaan budaya dan nilai-nilai di antara pihak-pihak yang terlibat harus diinternalisasi untuk mencari kesamaan kepentingan dari masing-masing pihak. Keterbukaan untuk memahami dan menghargai kekayaan keragaman budaya dapat mengurangi potensi konflik yang disebabkan oleh perbedaan interpretasi atau penggunaan bahasa yang tidak sensitif secara budaya. Memberikan umpan balik positif dalam komunikasi jaringan lingkaran dapat memotivasi anggota untuk tetap terlibat. Pujian dan pengakuan atas kontribusi setiap anggota dapat meningkatkan semangat kolaboratif.

Negosiasi Berkeadilan

Dalam menangani konflik di Pulau Rempang, pendekatan negosiasi adil dalam konteks jaringan lingkaran menjadi kunci untuk mencapai kesepakatan yang berkelanjutan dan memuaskan semua pihak terlibat (Burt, 1992). Negosiasi adil melibatkan pertimbangan terhadap kepentingan bersama, pencarian solusi yang dapat diterima oleh semua pihak, dan pencapaian konsensus melalui jaringan lingkaran, dengan cara-cara berikut:

- 1) Pertimbangan Kepentingan Bersama. Pertama-tama, penting untuk melakukan analisis kepentingan bersama. Ini melibatkan diskusi dan identifikasi area di mana kepentingan semua pihak dapat dipertimbangkan. Mungkin ada aspek tertentu dari proyek Eco-City yang dapat memberikan manfaat baik bagi pemerintah, masyarakat adat, maupun BP Batam. Memastikan transparansi tentang kepentingan setiap pihak adalah langkah penting. Ini menciptakan kepercayaan dan memungkinkan setiap pihak untuk memahami motivasi dan prioritas yang

mendasari posisi mereka. Kemudian menggali lebih dalam untuk memahami kebutuhan masing-masing pihak adalah esensial. Apakah itu kebutuhan ekonomi, budaya, atau lingkungan, pemahaman yang mendalam akan membantu membentuk solusi yang dapat memberikan keuntungan seimbang bagi semua pihak.

- 2) Mencari Solusi yang Mengakomodasi. Dalam jaringan lingkaran, fokusnya adalah mencari solusi yang merupakan kemenangan bagi semua pihak terlibat (*win-win solution*). Ini melibatkan kreativitas dalam menciptakan solusi yang memenuhi kepentingan utama masing-masing tanpa merugikan pihak tertentu. Sebagai contoh, mungkin ada kesepakatan untuk memberikan kompensasi yang adil kepada masyarakat adat tanpa mengorbankan proyek Eco-City. Selain itu penting pula untuk menjaga komunikasi terbuka selama proses negosiasi. Pihak-pihak yang terlibat perlu merasa nyaman berbagi ide, keprihatinan, dan usulan tanpa takut penghakiman. Ini membuka ruang bagi solusi yang inovatif dan beragam. Dalam mencari solusi yang dapat diterima oleh semua pihak, aspek lingkungan juga perlu dipertimbangkan. Mungkin ada cara untuk mengurangi dampak lingkungan proyek atau memasukkan praktik berkelanjutan sebagai bagian dari solusi keseluruhan.
- 3) Pencapaian Konsensus. Proses pencapaian konsensus dapat menjadi lebih dinamis. Setiap anggota jaringan dapat memberikan kontribusi pada pembentukan solusi. Penggunaan teknologi modern dapat mendukung proses ini, memfasilitasi diskusi dan pertukaran ide di antara semua pihak. Proses pencapaian konsensus tidak selalu berlangsung secara instan. Oleh karena itu, komunikasi terus-menerus adalah kunci. Dengan menjaga saluran komunikasi terbuka, pihak-pihak yang terlibat dapat beradaptasi dengan perubahan dan mengatasi hambatan yang mungkin muncul. Selain itu mencapai konsensus tidak hanya tentang menemukan kesepakatan teknis, tetapi juga menciptakan rasa kepemilikan bersama terhadap solusi yang dihasilkan. Ini melibatkan keterlibatan dan partisipasi aktif semua pihak dalam proses pengambilan keputusan.

Bentuk Komunikasi Pada Kasus Pulau Rempang Komunikasi Publik

Konflik yang terjadi di tengah warga Rempang ini merupakan hasil dari kurangnya komunikasi efektif antara pihak terkait. Sebenarnya, melalui pendekatan yang lebih baik dengan memberikan pemahaman dan partisipatif dengan mengajak warga untuk berdialog dan memberikan solusi yang tepat, maka keributan tersebut seharusnya dapat dihindari. Pada kasus ini tentu perlu peran pemerintah untuk turun tangan dalam rangka meredakan dan menyelesaikan konflik, sehingga perlu komunikasi publik sebagai salah satu bentuk komunikasi yang tepat untuk menangani permasalahan ini. Komunikasi publik mengacu pada upaya individu untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat secara luas.

Dalam konteks kasus ini, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia memiliki peran sebagai komunikator yang harus menyampaikan informasi kepada warga Rempang selaku publik. Pentingnya mengkomunikasikan fakta bahwa proyek pembangunan Rempang Eco City telah dimasukkan ke dalam Program Strategis Nasional (PSN) sesuai dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023. Kemudian, melalui proyek ini memiliki potensi investasi besar hingga Rp 381 triliun pada tahun 2080 dan menarik investasi dari perusahaan China Xinyi Group sebesar US\$11,6 miliar atau sekitar Rp 174 triliun. Hal ini dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi Pulau Rempang. Proses penyampaian informasi ini harus dilakukan secara transparan. Melalui komunikasi publik yang transparan, berbasis fakta, dan mengedepankan partisipasi masyarakat, diharapkan konflik agraria di Pulau Rempang dapat diatasi dengan cara yang adil dan berkelanjutan.

Komunikasi Kelompok

Konflik lahan di Pulau Rempang ini menggambarkan situasi di mana terjadi ketegangan komunikasi antara pemerintah pusat, BP Batam, PT Makmur Elok Graha, dengan warga lokal. Sebelum terjadinya bentrokan di Pulau Rempang, BP Batam telah memberikan sosialisasi terkait dengan akan dilakukan relokasi kepada warga tetapi sosialisasi yang dilakukan bersifat satu arah dan tidak partisipatif. Seorang warga di Sembulang, menyatakan bahwa hanya dilakukan sebanyak dua kali sosialisasi kepada warga yang terdampak (BBC Indonesia, 2023). Padahal pelibatan partisipasi masyarakat terkait dengan relokasi yang akan dilakukan dalam rangka pembangunan proyek Rempang Eco City merupakan hal yang penting untuk dilakukan. Dalam mengatasi permasalahan di antara beberapa pihak terkait tersebut, maka bentuk komunikasi kelompok dapat menjadi peran kunci guna mengatasi konflik ini. Penyelesaian konflik ini memerlukan pendekatan menyeluruh yang mempertimbangkan hak-hak semua pihak yang terlibat dalam isu kepemilikan tanah.

Pentingnya, setiap entitas tersebut untuk dapat memahami dan melaksanakan atas peran serta tugasnya sesuai dengan posisinya dan saling berkolaborasi guna mencapai tujuan bersama. Dalam konteks ini, maka setiap entitas perlu menjalankan peran mereka dengan membangun komunikasi yang bersifat dua arah bersama warga sehingga masyarakat dapat memahami atas persoalan yang terjadi dan mengetahui dampak positif yang akan diterima dari dilaksanakan pembangunan Rempang Eco City terhadap pertumbuhan ekonomi daerah maupun dampak negatifnya. Kemudian, tiap entitas tersebut perlu meningkatkan upaya sosialisasi secara berkelanjutan kepada masyarakat Pulau Rempang. Perlu ditekankan bahwa di dalam kegiatan sosialisasi yang dilakukan tersebut perlu dilakukan secara transparan kepada warga Rempang yang terkena dampak, sehingga warga merasa terlibat atas akan dilakukannya relokasi, serta setiap entitas perlu mendengar segala bentuk pendapat, pandangan dan opini warga maka sosialisasi yang terbangun bersifat partisipatif.

Relokasi tanpa partisipasi masyarakat dapat menimbulkan penolakan yang sulit diatasi. Pemikiran dan pandangan masyarakat harus diperhitungkan dengan serius. Dengan membangun komunikasi kelompok yang efektif, diharapkan dapat dicapai pemahaman bersama, kepercayaan, dan kolaborasi antara semua pihak terkait. Langkah-langkah konkret yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat diharapkan dapat diambil untuk menciptakan solusi yang memuaskan dan mencegah adanya pihak yang merasa dirugikan dan konflik yang lebih besar, sehingga proyek Rempang Eco City dapat dijalankan dengan lancar, memberikan manfaat ekonomi yang signifikan tanpa menimbulkan dampak negatif yang tidak diinginkan. Secara keseluruhan, membangun komunikasi kelompok yang efektif bukan hanya tentang menyampaikan informasi, tetapi juga melibatkan partisipasi aktif dari semua pemangku kepentingan. Pendekatan ini menciptakan dasar yang kokoh untuk menyelesaikan konflik dan mencapai konsensus dalam mengatasi permasalahan.

KESIMPULAN

Pada kasus konflik lahan di Pulau Rempang menunjukkan kurangnya komunikasi efektif yang terjalin antara pemerintah, BP Batam, dan warga lokal sehingga menjadi pemicu utama terjadinya bentrokan. Akibat dari tidak dilakukannya dialog yang bersifat partisipatif, ketidaktransparanan dalam sosialisasi relokasi, dan ketidak keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan telah memunculkan resistensi dan ketegangan. Solusi yang telah diberikan oleh pemerintah mencakup kompensasi dan tawaran lainnya kurang disosialisasikan dengan baik kepada masyarakat. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya peran komunikasi publik yang transparan dalam mengelola konflik agraria.

Melalui model komunikasi transaksional dan bentuk komunikasi publik serta kelompok menjadi solusi yang dapat diterapkan untuk menyelesaikan konflik ini. Dengan demikian, penyelesaian konflik lahan di Pulau Rempang memerlukan upaya komunikasi yang lebih baik,

partisipatif, dan transparan antara semua pihak terkait agar proyek pembangunan dapat berlangsung secara harmonis, memberikan manfaat ekonomi, dan tetap mempertimbangkan kepentingan, serta hak-hak masyarakat.

Referensi

- Assyifarizi, A., & Purwanto, I. (2023). Analisis Kewenangan Pengelolaan Dan Perlindungan Hukum Hak Atas Tanah di Pulau Rempang. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(5), 9077-9087. Diakses 15 November 2023 melalui <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/5831/4184>
- Basic Principles and Guidelines on Development-Based Eviction and Displacement A/HRC/18(2009)
- BBC News Indonesia. (2023, September 13). Rempang: 'Kami tidak akan pindah meski kami terkubur di situ'. BBC. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c1djjmmkp53o>
- BBC News Indonesia. (2023, September 17). Rempang: Polisi salahkan angin atas masuknya gas air mata ke wilayah sekolah, kata Komnas HAM. BBC. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c4nex0npy2vo>
- BBC News Indonesia. (2023, September 21). Rempang: 'Kami kompak tidak mau direlokasi' - Warga Pulau Rempang menolak klaim Menteri Bahlil bahwa mereka 'setuju untuk digeser'. BBC. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cxrl3200gr5o>
- Bragg, B., Cooley, S., Cooley, A., Hinck, R., & Kitsch, S. (2021, Januari 15). Transactional Communication Model: Quick Look. The Media Ecology and Strategic Analysis Group. Diakses 8 Desember 2023, dari <https://apps.dtic.mil/sti/citations/AD1129274>
- Brilian, A. P. (2023, September 18). Kisruh Pulau Rempang, Ini Janji Pemerintah untuk Warga yang Terdampak. detikcom.
- Burt, R. S. (1995). *Structural Holes: The social structure of competition*. Harvard University Press.
- Chaerudin, M. A. Y. C. (2023). Perlindungan Hak Tinggal Bagi Masyarakat Pulau Rempang Terhadap Penggusuran Proyek Strategis Negara. *Jurnal Socia Logica*, 3(3), 385-395. Diakses pada 29 November 2023 melalui <https://jurnal.anfa.co.id/index.php/JurnalSociaLogica/article/view/1299/1255>
- CNN Indonesia. (2023, September 12). Duduk Perkara Konflik Pulau Rempang. CNN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230912125946-12-997897/duduk-perkara-konflik-pulau-rempang>
- Cross, R., & Prusak, L. (2002). The people who make organizations go—or stop. *Harvard Business Review*.
- DeVito, J. A. (2018). *Human Communication: The Basic Course* (14th ed.).
- Fact Sheet No. 25/Rev.1 PBB (2014) tentang Penggusuran Paksa
- Febriyan. (2023, September 18). Konflik Pulau Rempang Terus Memanas, Komisi III DPR RI Akan Panggil Pengusaha. Nasional tempo.
- Gori, F., & Simamora, P. R. (2020). Pola Komunikasi Organisasi Dalam Meningkatkan Kinerja Kepala Desa Marao Kecamatan Ulunoyo Kabupaten Nias Selatan. *SOCIAL OPINION: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi*, 5(2), 115-122. Diakses 8 Desember 2023, dari <http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/socialopinion/article/view/773>
- <https://nasional.tempo.co/read/1773275/konflik-pulau-rempang-terus-memanas-komisi-iii-dpr-ri-akan-panggil-pengusaha>
- <https://regional.kompas.com/read/2023/09/20/142926478/soal-janji-untuk-warga-pulau-rempang-pengamat-pemerintah-sudah-mengalah>
- <https://www.detik.com/properti/berita/d-6937274/kisruh-pulau-rempang-ini-janji-pemerintah-untuk-warga-yang-terdampak>
- Maulana, H., & Putri, G. S. (2023, September 20). Soal Janji untuk Warga Pulau Rempang, Pengamat: Pemerintah Sudah Mengalah. *Regional Kompas*.

- Monge, P. R., & Contractor, N. S. (2003). *Theories of Communication Networks*. Oxford University Press.
- Nurdin, A., Moefad, A. M., Zubaidi, A. N., & Harianto, R. (2013). *PENGANTAR ILMU KOMUNIKASI*. IAIN Sunan Ampel Presss. http://repository.uinsa.ac.id/id/eprint/372/3/Al%20Nurdin_Buku%20Pengantar%20Ilmu%20Komunikasi_2013.pdf
- Prasetijowati, T., Nurany, F., & Julia Resa, M. N. (2023). Pola Komunikasi Organisasi Ketua Tim Sepakbola City Of Heroes Surabaya untuk Mengkoordinasi Anggota dalam Organisasi. *Public Sphere Review*, 2(1), 22-31. <https://doi.org/10.30649/psr.v2i1.79>. Diakses 8 Desember 2023, dari <https://psr.hangtuah.ac.id/index.php/jurnal/article/view/79>
- Setjen DPR RI. (2023, September 21). Pulau Rempang Miliki Akar Sejarah yang Harus Dihormati dan Diperhatikan dalam Pembangunan. <http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/46669>
- Sumardjono, M. S. (2023, September 17). Kehadiran Negara dalam Konflik Rempang. *Kompas.id*. Retrieved September 23, 2023, from <https://www.kompas.id/baca/opini/2023/09/17/tes-108>
- TVOne News. (2023, September 20). Kronologi Awal Konflik di Pulau Rempang, Investasi Bernilai Ratusan Triliun Berakhir Jeritan Pilu Warga Rempang. Diakses melalui: <https://www.tvonenews.com/berita/153785-kronologi-awal-konflik-di-pulau-rempang-investasi-bernilai-ratusan-triliun-berakhir-jeritan-pilu-warga-rempang?page=5>
- Undang-undang No. 26/2000 tentang Pengadilan HAM.
- University of Minnesota. (2016). *Communication in the Real World An Introduction to Communication Studies*. University of Minnesota Libraries. <https://open.lib.umn.edu/communication/>
- Walangare, S. G., & Bahri, S. (2023). Kontestasi Kepentingan Pro-Growth Coalition dan Anti-Growth Coalition dalam Konflik Pembangunan Rempang Eco-City Tahun 2023. *Madani Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan*, 15(2), 381-403. E-ISSN 2620 - 8857. Diakses 15 November 2023 dari <http://e-jurnal.unisda.ac.id/index.php/MADANI/article/view/5124/2709>
- Watzlawick, P., Beavin, J. H., & Jackson, D. D. (2011). *Pragmatics of Human Communication: A Study of Interactional Patterns, Pathologies, and Paradoxes*.